



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR : 700/ kep. 375- inspt/ 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 700/KEP.1089-INSPT/2016 TENTANG SATUAN TUGAS SAPU BERSIH
PUNGUTAN LIAR DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya pemberantasan pungutan liar secara terpadu guna menimbulkan efek jera kepada pelaku pungutan liar, telah dibentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Daerah Provinsi Jawa Barat berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 700/Kep.1089-Inspt/2016 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 700/Kep.1096.Inspt/2017;
- b. bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Daerah Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan perubahan kedua atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 700/Kep.1089-Inspt/2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Daerah Provinsi Jawa Barat, yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6037);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 211).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Ketentuan dalam Lampiran I Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 700/Kep.1089-Inspt/2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Daerah Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 700/Kep.1096.Inspt/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 700/Kep.1089-Inspt/2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Daerah Provinsi Jawa Barat, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 24 Mei 2019

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 700/ Kep. 375- Inspt/ 2019

TANGGAL : 24 Mei 2019

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA
BARAT NOMOR 700/Kep.1089-
Inspt/2016 TENTANG SATUAN
TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN
LIAR DI DAERAH PROVINSI JAWA
BARAT

SUSUNAN PERSONALIA

- | | | | |
|-------|---------------------------|---|--|
| I. | Penanggungjawab | : | Gubernur Jawa Barat. |
| II. | Wakil Penanggungjawab I | : | Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat. |
| III. | Wakil Penanggungjawab II | : | Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. |
| IV. | Wakil Penanggungjawab III | : | Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat. |
| V. | Ketua Pelaksana | : | Inspektur Pengawasan Daerah Kepolisian Daerah Jawa Barat. |
| VI. | Wakil Ketua Pelaksana I | : | Inspektur Daerah Provinsi Jawa Barat. |
| VII. | Wakil Ketua Pelaksana II | : | Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. |
| VIII. | Sekretaris I | : | Asisten Pemerintahan, Hukum, dan Kesejahteraan Sosial Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat. |
| IX. | Sekretaris II | : | Kepala Bagian Bin Opsnal Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Barat. |
| X. | Sekretaris III | : | Satuan Tugas Penanganan Lapdu Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Oton Hendra Rahayu, SH., MH). |
| XI. | Sekretaris IV | : | Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat. |
| XII. | Bidang Operasi | : | Kepala Bagian Wassidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Barat. |
| | Anggota | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kaur Dumas Inspektorat Pengawas Daerah Kepolisian Daerah Jawa Barat. (IPTU Agus Mulyadi. S.IP., M.Si). 2. Staf Inspektorat Pengawas Daerah Kepolisian Daerah Jawa Barat. (PENDA TK.I Moh. Zainal Arifin, S.Kom). 3. Staf Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Wira Muda Ferri Ridharta Assegaf). 4. Staf Inspektorat Pengawas Daerah Kepolisian Daerah Jawa Barat (Bripda Senna Virginia). 5. Staf Inspektorat Pengawas Daerah Kepolisian Daerah Jawa Barat (Penda Tk.I Ariana, S.E). |
| | Pa Posko | : | Staf Inspektorat Pengawas Daerah Kepolisian Daerah Jawa Barat (Ipda Dwi Ismariantono). |

- Anggota Posko : 1. Staf Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Jawa Barat (Bripka Yudi Firmansyah, S.H).
2. Staf Inspektorat Pengawas Daerah Kepolisian Daerah Jawa Barat (Brigadir Yayan Sofyan).
3. Staf Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Barat (Briptu Wahyu Purwanto).
4. Garnizun Tetap II Bandung (Peltu Dapri Wahyudin).
5. Staf Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Jawa Barat (Bripka Irwan Agustian).
6. Staf Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Barat (Brigpol Himawan Prasetyo, S.H).
7. Staf Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Barat (Bripda Aldy Apriansyah)
- XIII. Bidang Administrasi Umum : Perwira Pemeriksa Inspektorat Pengawas Daerah Kepolisian Daerah Jawa Barat (KOMPOL Henny Purwanti, S.IK., M.Si.)
- Anggota : 1. Staf Inspektorat Pengawas Daerah Kepolisian Daerah Jawa Barat (AKP Iswanti, S.H).
2. Staf Inspektorat Pengawas Daerah Kepolisian Daerah Jawa Barat (Penata Tk. I Heri Heriyadi, AKS.).
- XIV. Bidang Keuangan : Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat.
- Anggota : 1. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Bidang Keuangan Kepolisian Daerah Jawa Barat (AKBP Sigit Haryono, S.E., M.M).
3. Kepala Subbagian Perencanaan dan Pelaporan Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat.
4. Kepala Subbagian Keuangan dan Aset Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat (Elyna S Laura Siahaan, S.KP, M.H.)
6. Staf Kejaksaaan Tinggi Jawa Barat (Yuana Wira Rima Afniati, S.E).
7. Staf Keuangan Kepolisian Daerah Jawa Barat (Bripka Kusran Awaludin)
8. Bendahara Pengeluaran Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat (Eka Bida Bidani, A.Md.).

9. Bendahara Pengeluaran Pembantu Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat (Rika Supanti, S.E).
 10. Pelaksana pada Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lia Rusliawati, A.Md).
 11. Pelaksana pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Barat (Nanang Hernawan).
- XV. Bidang Logistik
- Anggota
- : Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
 - : 1. Kepala Bagian Rumah Tangga pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
 - 2. Kepala Subbagian Rumah Tangga Sekretariat Daerah pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
 - 3. Staf Inspektorat Pengawas Daerah Kepolisian Daerah Jawa Barat (Brigpol Ujang Supriatna, S.H).
 - 4. Pengurus Barang Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat (Yayat Hendayana).
- XVI. Bidang Data Informasi dan Publikasi
- Anggota
- : Inspektur Pembantu Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat pada Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat (M. Yudi Ahadiat, SH).
 - : 1. Staf Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Galih Arie Febriantiarno, A.Md).
 - 2. Staf Inspektorat Pengawas Daerah Kepolisian Daerah Jawa Barat (PENDA Didin Saepudin, A.Md).
 - 3. Staf Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Jawa Barat (Brigpol Doris Eko Prayudho).
- XVII. Pokja Intelijen
- Ketua
- : Direktorat Intel dan Keamanan Kepolisian Daerah Jawa Barat.
- Wakil Ketua I
- : Asisten Intel Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.
- Sekretaris
- : Staf Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Jaksa Madya Yayan Yunantoha, S.H).
- Kepala Tim I
- : Staf Direktorat Intel dan Keamanan Kepolisian Daerah Jawa Barat.
- Anggota
- : 1. Staf Direktorat Intel dan Keamanan Kepolisian Daerah Jawa Barat (Ipda Dede B. Emin).
 - 2. Staf Direktorat Intel dan Keamanan Kepolisian Daerah Jawa Barat (Aiptu Dadan).

3. Staf Direktorat Intel dan Keamanan Kepolisian Daerah Jawa Barat (Aipda Dimas Pradoto).
 4. Staf Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Dadan Alex, S.H.)
 5. Staf Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Agus Mujoko, S.H.)
 6. Staf Badan Intelijen Daerah Jawa Barat (Muhyidin S.Ag).
- Kepala Tim II : Staf Direktorat Intel dan Keamanan Kepolisian Daerah Jawa Barat (Kompol Asep Ridwan Hidayat, S.H).
- Anggota : 1. Staf Direktorat Intel dan Keamanan Kepolisian Daerah Jawa Barat (Iptu Tedi Triyono, S.Pd).
2. Staf Direktorat Intel dan Keamanan Kepolisian Daerah Jawa Barat (Aiptu Dedi Taryana).
 3. Staf Direktorat Intel dan Keamanan Kepolisian Daerah Jawa Barat (Aipda Iip Saepulloh).
 4. Staf Direktorat Intel dan Keamanan Kepolisian Daerah Jawa Barat (Brigpol Asep Pepen Sopandi, S.H.).
 5. Staf Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Rahmawan Hari W S.H., M.H.).
 6. Staf Badan Intelijen Daerah Jawa Barat (Mayor Kav Sajidin R S.H.).
 7. Staf Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Zaki, Amd).

XVIII. Pokja Supervisi dan Pencegahan

- Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- Wakil Ketua : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- Sekretaris I : Kepala Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
- Sekretaris II : Gadik Madya Sekolah Polisi Negara Kepolisian Daerah Jawa Barat (AKBP Drs. Adie Suwarman, STT., MK).
- Sekretaris III : Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian dan Pembangunan Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat.
- Sekretaris III : Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat
- Anggota : 1. Kepala Bidang Pelayanan Hukum kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat.
2. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
 3. Staf Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Hendra Sudirman, S.H., M.H.).
 4. Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Ahmad Efrizal, S.T., M.T.).
 5. Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Mujiono, S.AP., M.AP).

6. Staf Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat (Deden Firmansyah, S.H, M.H.).
7. Pelaksana pada Biro Hubungan Kemasyarakatan dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat (Dinda Nurizkia Hijriani).

XIX. Pokja Penindakan

- | | | |
|-----------------|---|---|
| Ketua | : | Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jawa Barat. |
| Wakil Ketua I | : | Direktur Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Barat. |
| Wakil Ketua II | : | Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. |
| Wakil Ketua III | : | Asisten Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. |
| Wakil Ketua IV | : | Wadanpomdam III/Siliwangi. |
| Sekretaris I | : | Kepala Bagian Pembina Operasi Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Jawa Barat. |
| Sekretaris II | : | Staf Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Jonny Panggabean, S.H., M.H). |
| Kepala Tim I | : | Staf Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Jawa Barat (AKBP Memed Suzana, S.H., M.H.). |
| Anggota | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Staf Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Barat (Iptu Herman Setiawan, S.H.). 2. Staf Pengamanan Internal Bidang Propam Kepolisian Daerah Jawa Barat. (Ipda Dicky Mulyadi). 3. Staf Pengamanan Internal Bidang Propam Kepolisian Daerah Jawa Barat. (Ipda Basukiyanta). 4. Staf Direktorat Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jawa Barat (Ipda Wawan Gunawan, S.H.). 5. Staf Direktorat Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jawa Barat (Brigpol Dudi Fauzi). 6. Staf Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Barat (Bripda Elsa Silvia Nadiana) 7. Staf Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Fery Hardiansyah, S.H.). 8. Staf Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Taryat Imansyah, S.H.). 9. Garnisun Tetap Komando Daerah Militer III/Siliwangi (Kapten CHB. Saeful Bahri). 10. Dan Satlak Lidpamfik Pomdam III/Siliwangi (Kapten CPM Yadi Setiadi). 11. Staf Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Jawa Barat (Bripda Reza Resitasari Nuramdani) |
| Kepala Tim II | : | Staf Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Barat (AKBP Basman, S.H.). |
| Anggota | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Staf Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Barat (Kompol Warna, S.H.). 2. Staf Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Jawa Barat (Kompol Zul Asmi). 3. Garnisun Tetap Komando Daerah Militer III/Siliwangi (Lettu CPM Jefri Ardiyanto). |

4. Garnisun Tetap Komando Daerah Militer III/Siliwangi (Lettu Pas Gunadi).
 5. Staf Direktorat Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jawa Barat (Briptu Hikmat Maulana).
 6. Staf Direktorat Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jawa Barat (Bripda Fahrizal Zulfikar).
 7. Staf Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Pratama Mursito, S.H.).
 8. Bintara Penyidik Sat Pomdam III Siliwangi (Pelda Sudrajat).
- Kepala Tim III : Staf Direktorat Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jawa Barat (AKBP Totok Dewanto, S.H).
- Anggota :
 1. Garnisun Tetap Komando Daerah Militer III/Siliwangi (Lettu POM Gin Gin Ginanjar).
 2. Staf Direktorat Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jawa Barat (Iptu Endang Mulyana, S.I.P., M.Si).
 3. Staf Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Jawa Barat (Brigadir Suharto AS, S.H.).
 4. Staf Direktorat Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jawa Barat (Brigda Agus Dadang).
 5. Staf Direktorat Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jawa Barat (Brigpol Dani Purwanto).
 6. Staf Direktorat Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jawa Barat (Brigpol Erwin Firmansyah, S.H.).
 7. Staf Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Jawa Barat (Bripka Abdul Ajij).
 8. Staf Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Tedy Setiawan, S.H.).
 9. Staf Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Sarifudin, S.H.).
 10. Staf Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Arief Koswara, S.H.).
- XX. Pokja Yustisi
- Ketua : Kepala Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
- Wakil Ketua I : Jaksa Fungsional Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Suharso, S.H., M.H.).
- Wakil Ketua II : Kepala Bidang Hukum Polda Jawa Barat (AKBP Dr. Yoslan S.H., M.H.).
- Sekretaris I : Staf Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Barat (Kompol Catur Hadi Santosa, S.H., M.H.).
- Sekretaris II : Staf Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Kiki Paulina, S.H.).
- Anggota :
 1. Kepala Subbagaian dumasikan Inspektorat Pengawas Daerah Kepolisian Daerah Jawa Barat (Kompol Rudi Suherman S.H.).
 2. Kepala Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Setda Provinsi Daerah Jawa Barat.
 3. Staf Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Isnain Ferdian, S.H.).
 4. Staf Bidang Hukum Kepolisian Daerah Jawa Barat (Pembina Atang Hermana, S.H., M.H.).

5. Koordinator Bidang Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Budi Nugraha, S.H.).
6. Staf Bidang Hukum Kepolisian Daerah Jawa Barat (Pembina Anang, S.H., M.Si.).
7. Staf Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Andi Andika W.R., S.Sos).
8. Staf Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Alwie, S.H., M.H.).
9. Staf Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Aburrahman Haris, A.Md.).
10. Staf Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Dody Kustiady Dipura, S.H.).
11. Analisis Hukum pada Biro Hukum dan Hak asasi Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat (Cahyo Purwanto, S.H.).
12. Staf Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Yuana Wira Carolina Rianti, S.E.).

XXI. Kelompok Ahli

1. Akademisi Institut Teknologi Bandung (Prof Dr Ir Deni Juanda Puradimaja, DEA).
2. Guru Besar Hukum Universitas Padjajaran (Prof Dr Sigit Suseno, S.H., M.Hum).
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung (Prof Dr Nandang Sambas, S.H., M.H.).
4. Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (Somawijaya, S.H., M.H.)
5. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Jawa Barat.
6. Pemerhati Pendidikan (Drs H M S Iriyanto).

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL